

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti dapat melihat bahwa, Menteri Luar Negeri Ali Alatas melihat Timor Timur sebagai bagian dari wilayah NKRI adalah harga mati. Beliau menganggap bahwa daerah Timor Timur meskipun dianggap sebagai kerikil dalam sepatu Indonesia, tidak berarti harus dilepaskan begitu saja, karena masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia dan proses dalam mempertahankannya telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari pihak Indonesia maupun dari pihak Timor Timur. Maka dari itu Ali Alatas tetap pada pendiriannya bahwa permasalahan di daerah Timor harus tetap diselesaikan dengan jalan diplomasi, bagaimanapun sulitnya jalur tersebut. Tidak ada alasan untuk melepaskan daerah Timor Timur, karena kesatuan NKRI adalah harga mati, dan wilayah Timor Timur adalah wilayah yang berharga bagi bangsa Indonesia, sama seperti wilayah Indonesia lainnya.

Kedua, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menempuh berbagai upaya diplomasi dengan pihak Portugal, PBB, maupun dengan pihak Timor Timur sendiri. Upaya diplomasi tersebut ditandai dengan diadakannya berbagai perundingan, diantaranya yaitu perundingan Tripartite Talks, yang dilakukan pihak Indonesia dengan pihak Portugal dengan pengawasan dari perwakilan PBB. Perundingan ini dilaksanakan sebanyak delapan kali, dimulai dari pertemuan pertama pada Desember 1992 yang berlangsung di New York, hingga pertemuan

terakhir pada Juni 1996 di Jenewa. Perundingan *Tripartite Talks* yang berlangsung selama delapan kali ini pada dasarnya dilakukan untuk membangun rasa saling percaya antara pihak Indonesia dan Portugis, baru pada pertemuan keenam dialog tripartite ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Timor Timur serta akar dari permasalahan tersebut. Pada pertemuan Tripartite tahap delapan yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 1996 di Jenewa, pembicaraan-pembicaraan lebih menuntut Portugal untuk menunjukkan kesungguhan terhadap penyelesaian permasalahan di Timor Timur. Namun, pada pertemuan ini justru tidak ditemukan kata sepakat diantara kedua belah pihak. Selain diadakannya delapan kali perundingan Tripartite Talks, diadakan pula pertemuan London yang menghasilkan empat hal penting yaitu empat masalah pokok mengenai rekonsiliasi dan PBB, mengenai pemerintah Portugal dan Indonesia, mengenai kerjasama dimasa depan dan mengenai permintaan pemimpin masyarakat Timor Timur yang berada diluar negeri kepada mitra mereka di Timor Timur untuk menyampaikan beberapa hal penting kepada pemerintah RI yaitu diantaranya mengenai pembangunan sekolah demi kelangsungan keberadaan budaya masyarakat Timor Timur. Selanjutnya diadakan pertemuan AIETD (*All Inclusive Intra East Timorese Dialogue*) AIETD bukan merupakan forum parallel dengan dialog segitiga dan tidak membicarakan status politik Timor Timur. Tujuan AIETD adalah untuk menentukan usulan-usulan konkret yang mempunyai dampak positif di Timor Timur dan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif pada dialog segitiga guna menyelesaikan permasalahan Timor Timur.

Selain mengadakan Pertemuan tersebut, pihak Indonesia juga telah memberikan sebuah opsi bagi masyarakat Timor Timur yang kemudian dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas kepada Sekjen PBB di New York pada tanggal 18 Juni 1998. Opsi tersebut yaitu pemberian status otonomi khusus kepada Timor Timur yang disambut baik oleh pihak Portugal. Namun, sambutan baik pihak Portugal ini tidak sepenuhnya menerima status otonomi tersebut sebagai penyelesaian akhir bagi masalah Timor Timur. Pihak Portugal menganggap bahwa status otonomi tersebut hanya bersifat sementara, hingga Timor Timur siap untuk menentukan nasibnya sendiri.

Sebagai tindak lanjut atas pemberian opsi otonomi khusus tersebut, pihak Indonesia dan Portugal meningkatkan intensitas pertemuan mereka dan hasilnya adalah diadakannya pertemuan SOM (*Senior Official Meeting*). Pada pertemuan tersebut, posisi dasar Indonesia dan Portugal dikesampingkan, hingga selesainya rancangan sementara konsep Daerah Otonomi Khusus. Selama proses perundingan dan penyerapan aspirasi rakyat Timor Timur peran pemerintah Republik Indonesia khususnya TNI tidak dapat dikesampingkan. Pertemuan SOM ini terus membahas mengenai konsep dari pemberian otonomi khusus, namun proses ini tidak berjalan dengan lancar dan terkesan lambat. Namun, sementara pertemuan ini belum menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak, presiden B.J Habibie mengeluarkan opsi kedua yaitu opsi untuk merdeka. Opsi ini merupakan keputusan sepihak dari pemerintah B.J Habibie dan dinilai melangkahi proses yang sedang berlangsung. Keputusan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan dari pihak Ali Alatas sendiri, karena proses diplomasi yang ia

lakukan perihal konsep daerah otonomi khusus tersebut masih berlangsung dan sudah hampir menemui titik temu, antara pihak Indonesia, dengan pihak Portugis.

Keputusan dari pemerintah B.J Habibie ini dapat dinilai sebagai suatu kesalahan dari pihak Indonesia, karena secara tidak langsung dengan dikeluarkannya opsi tersebut, Indonesia telah melepaskan Timor Timur. Selain dikeluarkannya opsi kedua tersebut, kesalahan Indonesia adalah terburu-burunya pihak Indonesia menerima konsep Otonomi Seluas-luasnya, padahal istilah ini hanya dikenal masyarakat Timor Timur yang ada dikalangan atas saja, sedangkan kalangan menengah dan bawah belum begitu mengenal istilah otonomi seluas-luasnya sedangkan istilah 'Kemerdekaan' itu sudah dikenal oleh masyarakat Timor Timur sebelum berintegrasi dengan Indonesia, sehingga Indonesia dianggap gagal karena masyarakat Timor Timur lebih memilih opsi kedua yaitu kemerdekaan.

Setelah dikeluarkannya dua opsi oleh pemerintah Indonesia, maka pihak PBB dan Portugal kembali mengusulkan untuk diadakan kembali dialog segitiga sebagai tindak lanjut dari keluarnya opsi tersebut. Maka, diadakanlah proses jajak pendapat bagi warga Timor Timur sesuai dengan keputusan dari dialog segitiga tersebut. Proses jajak pendapat ini, pada masa awal kampanye pun telah menimbulkan kekacauan di Timor Timur. Pihak yang pro Integrasi dan pro kemerdekaan mengalami ketegangan, mereka saling melakukan teror dan intimidasi. Karena adanya kekacauan tersebut, maka untuk menjaga agar proses jajak pendapat dapat berlangsung dengan aman, jujur, dan adil, kedua belah pihak

meminta PBB untuk membentuk UNAMET. Kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan dana diserahkan sepenuhnya kepada PBB. Mengingat kondisi realistis di lapangan, pemerintah Indonesia disertai tanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan di Timor Timur Tugas ini sungguh tidak ringan, mengingat situasi konflik pasca pengumuman Opsi I dan Opsi II masih meninggalkan sejumlah masalah. Dari jajak pendapat tersebut, akhirnya diperoleh hasil yaitu sebagian besar warga Timor Timur Memilih untuk melepaskan diri dari wilayah NKRI, hal ini menimbulkan kekecewaan dari pihak pro Integrasi, yang kembali menyulut pertikaian antara kedua belah pihak, dan akhirnya dapat diselesaikan dengan bantuan pasukan dari pihak PBB yaitu INTERFET.

Ketiga, dalam upaya diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas menemui beberapa kendala yaitu, belum diakuiinya status Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia oleh dunia Internasional. Wilayah Timor Timur masih dianggap sebagai wilayah Administratif atau wilayah seberang lautan Portugis. Karena itu wilayah Timor Timur diombang-ambing oleh kepentingan nasional berbagai negara bahkan oleh politisi yang mewakili kelompok kecil masyarakat di dalam suatu negara seperti di Amerika Serikat. Selain itu permasalahan yang juga menjadi kendala bagi berjalannya diplomasi Indonesia di Timor Timur adalah kurang adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pelaksana proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Timor Timur. Seharusnya, karena masalah tersebut sedang mengalami suatu proses negosiasi, pemerintah berkomunikasi dengan pihak yang melakukan upaya diplomasi tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali

Alatas. Karena bagaimanapun juga pemerintah tidak dapat mengambil keputusan sepihak tanpa adanya proses perundingan dengan pihak diplomat, atau orang yang terlibat langsung dalam proses perundingan tersebut.

Selain itu diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Ali Alatas ini lebih dititik beratkan pada perbaikan citra bangsa Indonesia di mata dunia Internasional, sedangkan upaya untuk mengambil hati masyarakat Timor Timur dari berbagai kalangan kurang diperhatikan, sehingga banyak rakyat Timor Timur yang menganggap bahwa, Indonesia kurang menguntungkan dan malah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Timor Timur, dan lebih memilih untuk memisahkan diri dari wilayah kesatuan Republik Indonesia dengan status merdeka. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Timor Timur mengenai konsep otonomi khusus yang akan diberikan pada wilayah tersebut, menjadikan banyak dari mereka yang lebih memilih konsep Kemerdekaan yang jauh lebih dikenal oleh masyarakat Timor Timur dibanding dengan konsep Otonomi Khusus terutama kalangan masyarakat sipil.